

POLITIK LUAR NEGERI PRESIDEN AMERIKA SERIKAT BARACK OBAMA TERHADAP GERAKAN *ISLAMIC STATE* *OF IRAQ AND SYRIA* (2009-2016)

Haidar Amin¹ dan Sidik Jatmika²

ABSTRACT

This thesis aims to find out how the attitude of America against ISIS, and also to see what the main factors that make the United States of America against ISIS, and how the United States take precautionary action against ISIS. This thesis using the descriptive explanative method, and the data were collected through the library research. Then the data from books, journals, magazines, and other documents were analyzed in qualitatively.

The results showed that the ISIS is a radical group that has a revolutionary thought and beliefs. That doing movements by force and destruction, based in Iraq and Syriah, both on government facilities, places of worship and people who disagree with them. In them action, ISIS strengthen them self by recruiting people that agree with them from various countries.

By these condition, which the United States has a moral responsibility for the security and discipline of the world and has a great interest in Iraq and Syria. So, United States have to do preventive and repressive measure to destroying ISIS.

Keywords: *United States of America (USA), Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), terrorism.*

PENDAHULUAN

Amerika Serikat adalah sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari lima puluh negara bagian dan sebuah distrik federal. Negara ini terletak di bagian tengah Amerika Utara, yang menjadi lokasi dari empat puluh delapan negara bagian yang saling bersebelahan, beserta distrik ibu kota Washington D.C.. Amerika Serikat diapit oleh Samudra Pasifik dan Atlantik di sebelah barat dan timur, berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, dan Meksiko di sebelah selatan. Dua negara bagian lainnya yaitu Alaska dan Hawaii, terletak terpisah dari dataran utama Amerika Serikat. Negara bagian Alaska terletak di

¹ Penulis Kesatu, Mahasiswa S1 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

² Penulis Kedua, Dosen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

sebelah ujung barat laut Amerika Utara, berbatasan dengan Kanada di sebelah timur dan Rusia di sebelah barat, yang dipisahkan oleh Selat Bering. Sedangkan negara bagian Hawaii adalah sebuah kepulauan yang berlokasi di Samudra Pasifik. Dengan luas wilayah 3,79 juta mil persegi (9,83 juta km²) dan jumlah penduduk sebanyak 315 juta jiwa, Amerika Serikat merupakan negara terluas ketiga di dunia dan terbesar ketiga menurut jumlah penduduk.

Pasaran energi Amerika Serikat adalah 29.000 jam-terawatt per tahun dan konsumsi energi per kapita adalah 7,8 ton kesetaraan minyak per tahun. Pada 2005, 40% energi ini berasal dari minyak bumi, 23% dari batu bara, dan 22% dari gas alam. Sisanya dipasok oleh tenaga nuklir dan sumber energi terbarukan lainnya. Dari data tersebut terlihat bahwa sumber energi utama Amerika Serikat adalah minyak bumi, bahkan Amerika Serikat tercatat sebagai konsumen minyak bumi terbesar di dunia. (Fitriana Monica Sari; 2016) Jadi, tidak heran apabila Amerika Serikat memusatkan perhatiannya secara intensif terhadap kawasan Timur Tengah.

Timur Tengah adalah sebuah wilayah yang secara politis, dan budaya merupakan bagian dari benua Asia, atau Afrika-Eurasia. Selain merupakan tempat kelahiran, dan pusat spiritual agama Islam, Kristen, dan Yahudi, Timur Tengah juga mempunyai cadangan minyak mentah dalam jumlah besar. Salah satu negara di Timur Tengah yang mempunyai cadangan minyak mentah dalam jumlah besar adalah Irak. Diperkirakan kapasitas kandungan minyak Irak sebesar 112 miliar barel yang berarti menempati urutan kedua setelah Arab Saudi. (Sidik Jatmika;2014) Kualitas minyak bumi Irak pun juga terkenal sangat baik. Hal inilah yang membuat politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Irak mempunyai porsi dan perhatian yang cukup besar.

Pada tahun 2004, setahun setelah invasi Amerika Serikat di Irak, seorang warga Yordania, Abu Muzab Az-Zarqawi mendirikan sebuah kelompok beraliran *salafi* yang bernama *Jama'ah Tauhid & Jihad JTJ*). Kelompok inilah yang nantinya menjadi cikal bakal terbentuknya gerakan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Secara bahasa, kata '*salaf*' berarti yang sudah lalu, namun kata '*salaf*' atau *salafiyah* digunakan untuk menunjuk generasi perintis umat Islam. (Fernando Tambunan; 2014)

Zarqawi membangun kelompok ini menjadi sebuah pasukan mobilisasi yang dikenal dengan nama Jundusy Syam (tentara syam). Zarqawi merekrut masyarakat Islam terbuang yang berasal dari Yordania, Palestina, dan Suriah yang berada di Eropa. Pada tahun 2001, populasi di *camp* Herat sudah mencapai dua ribu sampai tiga ribu orang, sehingga menjadikan Zarqawi sebagai pemimpin penuh kelompok teroris di Herat.

Pada Oktober 2004, JTJ secara resmi berbaiat kepada Al-Qaeda. Berbaiat merupakan perjanjian untuk memberi ketaatan dan membuat janji setia. Dengan adanya hal tersebut, maka JTJ berubah menjadi Tanzim Qadatfi Al-Jihad fi Bilad Al-Rafidayn, yang berarti Al-Qaeda di negeri dua sungai, karena negara Irak

dibelah oleh dua sungai, yaitu Sungai Tigris dan Eufrat. Akan tetapi, di kalangan internasional kelompok ini dikenal sebagai Al-Qaeda in Iraq (AQI).

Sepanjang tahun 2005, kegiatan AQI semakin meningkat dan bertambah ganas. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya bom bunuh diri, pembunuhan, dan pemenggalan. Pada bulan Januari 2006, Al-Qaeda memerintahkan AQI serta kelima grup yang berafiliasi dengan Al-Qaeda agar bersatu, di mana kelima grup tersebut adalah Jaish At-Taifha Al-Mansoura, Katbiyan Ansar At-Tawhid was-Sunnah, Faksi Saray Al-Jihad, Brigade Al-Ghuraba, dan Al-Ahwal Brigade.

Keseluruhan kelompok ini bersatu dan menjadi *Mujahideen Shura Council* (MSC) atau majelis syura. MSC merupakan organisasi payung yang bertujuan untuk mempersatukan semua kelompok sunni di Irak, dan MSC menyatakan menghapus kelompok-kelompok jihad termasuk AQI, serta mengangkat Zarqawi sebagai pemimpin kelompok ini.

Pada 2006, Zarqawi meninggal dunia di daerah hibib akibat serangan udara Amerika Serikat. Dengan meninggalnya Zarqawi, MSC dan seluruh kelompok yang beraliansi dengan MSC memproklamkan berdirinya *Islamic State of Iraq* (ISI) dengan mengangkat Abu Umar Al-Quraisy Al-Husaini Al-Baghdadi sebagai pemimpin.

Abu Umar Al-Baghdadi, merupakan mantan anggota pasukan keamanan Irak yang dipecat karena sifat ekstremismenya. ISI memiliki pemikiran yang lebih maju dibandingkan JTJ dan AQI. Hal ini karena ISI memiliki rancangan kabinet dan konstitusi. ISI yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Irak dan menggantinya dengan negara Islam murni, menempatkan fokus yang lebih besar kepada masa depan perang, kelompok, dan Irak. Hal ini berbeda dengan Zarqawi, karena ia lebih berfokus kepada konsolidasi kekuasaan dan mengalahkan musuh secara langsung.

Di bidang militer, ISI masih menggunakan taktik yang dulu kerap digunakan oleh AQI, salah satunya taktik meledakkan bom di kawasan padat penduduk. Taktik yang lantas membuat ISI dimusuhi oleh orang-orang Irak. Sehingga, pada awal tahun 2007, ISI mulai terlibat konflik dengan milisi-milisi yang tidak sejalan dengan mereka. Namun, tidak lama memimpin organisasi tersebut Abu Umar Al-Baghdadi tewas dalam serangan gabungan antara pasukan Irak dan Amerika Serikat. Kemudian, Majelis Syura memilih Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai pemimpin Tanzhimu Ad-Daulah Al-Islamiyah fi Al-Iraq.

Masuknya ISI ke Suriah ditandai dengan keluarnya pernyataan dari Abu Bakar Al-Baghdadi pada bulan April 2013, yang menyatakan bahwa jika ISI melebur dengan Jabhat An-Nusra (JN) yang berada di Suriah untuk membentuk Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Jabhat An-Nusra sendiri merupakan kelompok pemberontak Suriah yang berideologi Islam dan banyak beranggotakan veteran konflik Irak. Pada awalnya, Jabhat An-Nusra tidak keberatan.

Namun, kontroversi timbul karena tidak lama keluarnya pernyataan Abu Bakar Al-Baghdadi, Abu Muhammad Al-Jaulani, pemimpin Jabhat An-Nusra memberi pernyataan jika kelompoknya tidak bersedia melebur dengan ISIS. Menurut Nathaniel Rosenblatt, ada dua alasan mengapa JN berpisah dengan ISIS, pertama, karena JN tidak mendukung negara Islam di seluruh wilayah, tetapi hanya fokus kepada Suriah. Kedua, meskipun keduanya percaya pada negara Islam, JN tidak memaksakan agenda mereka. Jika ISIS secara eksplisit melarang rokok di desa-desa, JN hanya menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak tepat. Maka, sejak saat itu terjadi perpecahan internal di Jabhat An-Nusra, antara pengikut setia Abu Bakar Al-Baghdadi dan pengikut Al-Jaulani. Sejak perpecahan itu, ISIS melakukan teror sendiri ke Suriah. Mereka menjadikan Raqqa sebagai basis komando dan kekuatan mereka di Suriah. (Kiram Ikhwanul Mashuri; 2014)

Tidak hanya dari Jabhat An-Nusra, Al-Qaeda memutuskan hubungan dengan ISIS dan menolak adanya ISIS. Pemimpin Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri mengatakan, tidak terlibat lagi dengan kelompok pemberontak jihad paling agresif di Irak dan Suriah. Zawahiri menilai ISIS sebagai kelompok pembangkang yang merusak citra Al-Qaeda lewat bom mobil, pembunuhan massal, dan penyiksaan sesama muslim.

Jabhat An-Nusra merupakan salah satu kelompok jihadis yang ada di Suriah. Kelompok jihadis merupakan kelompok yang berafiliasi dengan al-Qaida. Pada awalnya kelompok ini membantu oposisi Suriah dalam melakukan pemberontakan terhadap rezim Assad, Kelompok jihadis ini juga mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya seperti; diberikan bantuan dana, diberikan peralatan senjata, dilatih cara berperang, dll. Namun dalam perkembangannya, mereka tidak lagi membantu para oposisi, tetapi memiliki agenda tersendiri untuk membentuk khilafah. Di antara kelompok jihadis tersebut adalah Jabha al-Nusra, Ahrar al-Sham kataeb, Liwa' al-Tauhid, Ahrar Souria, Halab al-Shahba, al-Harakah al-Fajr al-Islamiah, Dar al-Ummah, Liwa Jaish Muhammad, Liwa' al-Nasr, Liwa' Dar al-Islam dan lain-lain;

Kelompok Jihadis menyatakan bertanggungjawab dalam sejumlah aksi bom bunuh diri yang ditargetkan terhadap pemerintah Suriah selama terjadinya perang sipil di negara tersebut. Pada Desember 2012, Amerika Serikat menyatakan kelompok jihad Jabhat al-Nusra sebagai kelompok teroris. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah keterlibatan kaum ekstremis dalam grup oposisi Suriah.

Akibat yang ditimbulkan oleh kemunculan gerakan kelompok ISIS maupun kelompok-kelompok teroris lainnya tersebut, tentu saja mendapat reaksi keras, bukan hanya dari pemerintah yang berkuasa di Irak dan Suriah untuk menumpas gerakan tersebut, tetapi juga dari pihak Amerika Serikat bersama negara-negara Barat lainnya yang merasa terancam menjadi korban bagi warga negaranya. Khusus bagi Amerika Serikat, sebagai negara "penguasa" di Irak dan memiliki kepentingan di Suriah, merasa perlu melakukan upaya preventif dan represif. Di mana upaya preventifnya adalah Amerika Serikat membentuk koalisi

internasional, sedangkan upaya represifnya adalah Amerika Serikat melancarkan serangan militer terhadap gerakan ISIS.

Keseriusan Amerika Serikat dalam memerangi ISIS terbukti dengan membentuk koalisi dengan berbagai negara baik dengan sekutu-sekutunya di Timur Tengah maupun di luar Timur Tengah. Hal ini dilakukan mengingat kekuatan ISIS baik di Irak maupun di Suriah sangat besar dan memiliki tingkat militansi yang tinggi.

Koalisi Internasional yang dibentuk oleh Amerika Serikat mendapat tanggapan positif dari dunia internasional. Dengan bergabungnya beberapa negara dalam koalisi tersebut diharapkan akan menghambat meluasnya gerakan ISIS. Anggota koalisi pun diharapkan dapat memberikan dukungan baik bantuan kemanusiaan ataupun bantuan kemiliteran.

Kemudian, untuk upaya represifnya, Amerika Serikat melancarkan serangan militer terhadap gerakan ISIS guna membasmi keberadaan mereka. Amerika Serikat bersama dengan pasukan koalisi berusaha menggempur ISIS habis-habisan, tidak tanggung-tanggung serangan militer yang dilancarkan melalui dua jalur sekaligus yakni jalur udara dan jalur darat. Kombinasi serangan udara militer Amerika Serikat dibantu dengan pergerakan darat dari militer Irak benar-benar efektif untuk menyudutkan dan melemahkan posisi ISIS di Irak, baik secara jumlah militan yang tewas maupun secara moral yang mengalami penurunan. (Willy Haryono;2016)

Dalam beberapa kepemimpinan Presiden Amerika Serikat sebelumnya, Irak memang menjadi salah satu perhatian bagi politik luar negeri Amerika Serikat terutama mengenai isu terorisme dan di masa kepemimpinan Presiden Obama, GWOT masih menjadi salah satu PLN Amerika terhadap gerakan ISIS.

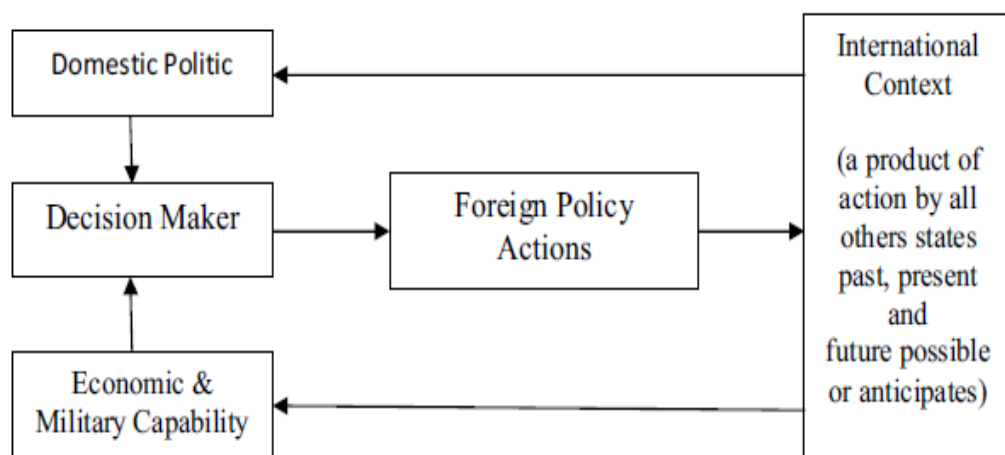
KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri (William D.Coplin)

Kebijakan luar negeri suatu negara pada umumnya merupakan hasil dari serangkaian keputusan yang berkaitan dengan fenomena antar bangsa. Biasanya kebijakan tersebut dikeluarkan oleh negara untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dengan negara lain. Dalam tulisan ini, untuk menjelaskan tentang kebijakan Presiden Barack Obama memerangi gerakan *Islamic State of Iraq and Syria* (2009-2016), penulis menggunakan pendekatan Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri menurut William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul "*Introduction of International Politic*". Teori ini akan menjelaskan bagaimana serangkaian proses pengambilan keputusan luar negeri dirumuskan beserta hal-hal yang memengaruhinya.

William D Coplin menggambarkan teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri dalam sebuah model, sehingga membantu menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan suatu negara diambil. Pembuatan Kebijakan Luar Negeri dibuat atas pengaruh dari pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut Coplin sendiri, bahwa kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari tiga konsiderasi yang memengaruhi para pengambil keputusan luar negeri. Ketiga konsiderasi tersebut yaitu; pertama, kondisi politik dalam negeri, kedua adalah kapabilitas ekonomi dan militer, dan yang terakhir adalah konteks internasional, yaitu posisi khusus suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. (William D. Coplin; 2003)

Model Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri (William D. Coplin)



PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kebijakan Barack Obama Memerangi *Islamic State of Iraq and Syria*

Keberadaan gerakan ISIS baik di Irak maupun di Timur Tengah benar-benar telah membuat stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah menjadi terancam. Bahkan seiring berjalannya waktu, tingkat dan intensitas teror yang dilancarkan ISIS pun meningkat dan hal itulah yang membuat perdamaian internasional menjadi ikut terancam. Apa yang ISIS lakukan benar-benar tidak memiliki nilai-nilai peri kemanusiaan, bukan hanya non-nuslim saja yang mereka anggap kafir, tetapi sesama umat muslim pun akan mereka anggap kafir dan “halal” untuk diperangi, apabila dianggap tidak sepaham dan menghalang-halangi. Hal-hal itulah yang membuat Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, memerangi gerakan ISIS. Terdapat tiga (3) faktor yang memengaruhi kebijakan Obama memerangi ISIS, di antaranya; Politik Dalam Negeri; Ekonomi dan Militer; dan Konteks Internasional.

Kondisi Politik Dalam Negeri; Terorisme sebagai Musuh Bersama Bangsa Amerika Serikat

Terorisme yang seperti kita ketahui merupakan serangkaian serangan terakomodasi yang semata-mata untuk meningkatkan rasa teror terhadap sekelompok masyarakat. Sejak terjadinya peristiwa *World Trade Center* (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, istilah terorisme ini mulai mencuat. Hal ini langsung menjadi fokus utama Amerika Serikat yang pada akhirnya mengeluarkan kebijakan menentang terorisme.

Pasca Tragedi 9/11, Presiden Bush membuat agenda untuk menginvasi Irak di tahun 2003. Bush beranggapan, betapa pentingnya menginvasi Irak sebagai respon terhadap tragedi 9/11 yang menyebabkan trauma bagi warga Amerika Serikat, sebagai *war on terrorism* untuk memusnahkan *Weapon Mass Destruction* (WMD) yang diduga ada di Irak dan sebagainya. Untuk dapat diterima usulan agendanya di Kongres, Bush melakukan berbagai cara untuk meraih dan membentuk opini publik yang sejalan dengan kebijakannya itu. Berbagai seruan dilontarkan dan pihak media pun turut membantu dalam membungkus dan menyebarkan secara masif ke penjuru kota, negara bagian, dan tingkat federal, sehingga isu invasi Irak ini menjadi sorotan publik dan nantinya dapat membentuk opini publik secara keseluruhan yang mendukung invasi Amerika Serikat ke Irak tersebut. Alhasil, atas nama pemberantasan terorisme, dan menyebarkan demokrasi, serta adanya dukungan dari politik dalam negeri, akhirnya Amerika Serikat melancarkan invasi ke Irak.

Berlanjut ke presiden yang selanjutnya yakni Presiden Barack Obama. Visi Obama tetap menjalankan politik *war on terrorism*. Hal tersebut bisa dilihat dari kebijakan Obama di Afghanistan yang memutuskan untuk menambah pasukan Amerika Serikat di negara itu dalam rangka memerangi Taliban dan Al Qaeda. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa ia tak berbeda jauh dengan George W. Bush yang menggunakan kekuatan militer untuk mengukuhkan hegemoni Amerika Serikat di Afghanistan. Kemudian, di periode kedua Obama menjabat sebagai presiden, kampanye *war on terrorism* masih terus berlanjut dan menjadi salah satu alat politik luar negeri Obama. Kelompok teroris selanjutnya yang menjadi sasaran untuk diperangi adalah kelompok ISIS yang berbasis di Irak dan Suriah. Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa dari partai manapun presidennya berasal, politik *war on terrorism* akan selalu menjadi perhatian utama bagi Amerika Serikat, namun memiliki cara yang berbeda di dalam merealisasikannya.

Posisi Partai Demokrat pasca serangan terorisme 9/11 masih menjadi “*the Second Party*”, maksudnya Partai Republik di bawah kepemimpinan Bush masih bertindak sebagai *incumbent* pada tahun 2001 sampai pada akhirnya digantikan oleh Obama melalui kemenangan di dalam Pemilu 2008, yang berasal dari Partai Demokrat. Pada masa pemerintahannya, Bush telah mencanangkan GWOT yakni “*Global War on Terrorism*” untuk menghadapi aksi-aksi terorisme, sebagai bentuk respon nyata terhadap tragedi 11 September 2001. GWOT pada dasarnya didukung oleh kedua partai, Republik dan Demokrat. Sikap Partai Demokrat di

dalam menghadapi isu terorisme banyak dipengaruhi dengan munculnya “*the Big Lie*” yakni Bin Laden yang telah dianggap sebagai musuh bersama yang mengancam Amerika Serikat. Sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya, bentuk dukungan Partai Demokrat juga dikemukakan oleh Senator Delaware, Joe Biden yang memuji sikap yang diambil oleh Bush melalui kebijakan *forward defense*. Menurut Biden, sikap ini merupakan hal yang paling berani yang telah dilakukan presiden selama 30 tahun pemerintahan di Amerika Serikat. Pada Oktober 2001, kebijakan pemerintah Bush untuk melakukan invasi di Afghanistan didukung oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dengan berbagai latar belakang.

Barack Obama sebagai kader Partai Demokrat dalam kampanyenya pada pemilu 2008 telah menyatakan akan mendorong penyelesaian tragedi 9/11 tersebut. Setelah Partai Demokrat menduduki jabatan sebagai *incumbent*, Afghanistan yang terdiri dari 42 juta penduduk itu digambarkan sebagai negara sponsor di balik terjadinya peristiwa penyerangan terorisme 9/11. Alasan inilah yang kemudian dikemukakan oleh Partai Demokrat untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintahan Bush di bawah Partai Republik di dalam menanggulangi masalah terorisme.

Pada awal masa pemerintahannya, Obama memutuskan untuk berkonsentrasi terhadap invasi di Afghanistan dalam rangka penanggulangan terorisme. Isu “*the Global War on Terrorism*” menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kampanye Obama dan juga Partai Demokrat. Pada masa itulah kemudian muncul istilah “islam teroris” yang merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa Amerika. Media massa banyak memberikan pujian akan sikap tegas Obama mengenai terorisme. Kebijakan Obama mengenai penarikan pasukan dari Irak dan penambahan pasukan ke Afghanistan sebagai kebijakan kontra terorisme menunjukkan bahwa pemerintahan Amerika Serikat di bawah Partai Demokrat pada masa Obama tidak berbeda jauh dengan pemerintahan di bawah Bush yang berasal dari Partai Republik.

Meskipun demikian di tengah isu terorisme yang dipandang sebagai ancaman bagi bangsa Amerika, Obama tidak melupakan isu penting lainnya yakni isu ekonomi dan juga kemanusiaan. Ketika naik sebagai Presiden Amerika Serikat, Obama dihadapkan pada masalah krisis finansial yang mengguncang negaranya. Pada masa pemerintahan sebelumnya, Bush mengeluarkan kebijakan penanggulangan terorisme yang cukup merugikan bagi perekonomian Amerika Serikat. Bush memaksa mengeluarkan dana untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara melalui *forward defense*, sehingga kemudian menjadi salah satu penyebab keuangan negara menjadi terancam. Kemudian, *war on terrorism* ini didanai lewat pengurangan besar-besaran program sosial Amerika, sehingga kebijakan ini turut berkontribusi dalam memperburuk tingkat kemiskinan dan pengangguran rakyat Amerika Serikat sendiri.

Dalam kampanyenya, Obama menyatakan bahwa Perang Ekonomi justru memicu terciptanya pengangguran dan kemiskinan di Amerika Serikat di mana pada saat yang sama menciptakan kematian dan kehancuran pada perang melawan

terorisme yang dilakukan Amerika Serikat di Timur Tengah.(Michel Chossudovsky; 2005) Sedangkan isu kemanusiaan berkaitan dengan terorisme yang muncul pada masa pemerintahan di bawah Partai Demokrat adalah masalah penyiksaan terhadap tahanan di Guantanamo serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi di Irak.(Mary Bruce; 2009) Tekanan terhadap masalah kemanusiaan di Guantanamo menjadi salah satu sebab Obama merencanakan untuk menutup tempat tahanan bagi para teroris yang tertangkap tersebut serta menarik pasukan dari Irak, meskipun penarikan pasukan tersebut diiringi dengan penambahan pasukan di Afghanistan.

Peningkatan jumlah pasukan ini diperlukan untuk menstabilkan situasi di Afghanistan, yang belum mendapat perhatian strategis, arah, dan sumber daya yang dibutuhkan. Di balik alasan sebagai perang terhadap terorisme, Afghanistan menjadi wilayah yang penting karena menghubungkan Asia Selatan, Pakistan, dan India. Selain itu, kepentingan Amerika Serikat di sana adalah untuk membendung kekuatan terorisme yang ada di Timur Tengah. Obama berencana memperluas pemeriksaan, keanggotaan, serta meningkatkan wewenang NSC (*National Security Council*) dalam hal pengaturan strategi dalam lingkup internasional dan domestik. NSC memberikan asistensi kepada Obama untuk mengeluarkan kebijakan terhadap masalah Afghanistan agar diselesaikan tidak melalui tindakan sereaktif Irak. Kebijakan kali ini lebih bersifat preventif daripada reaktif untuk mengamankan kepentingan Amerika Serikat di sana. Dalam hal ini prinsip yang coba diterapkan adalah prinsip similaritas. Dengan melakukan tindakan ini Amerika Serikat mendapatkan dua keuntungan sekaligus yaitu masalah keamanan dan masalah energi.

Di periode kedua Obama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, baik Obama maupun partai pengusungnya yaitu Partai Demokrat masih menjadikan isu terorisme sebagai salah satu fokus utama politik luar negeri Amerika Serikat. Meskipun kebijakan Obama untuk menginvasi Afghanistan di periode pertama ia menjabat sebagai presiden berhasil menewaskan pemimpin kelompok teroris Al-Qaeda yakni Osama bin Laden, ternyata hal tersebut bukan menjadi jaminan bahwa kobaran perang melawan terorisme akan padam dan berakhir begitu saja. Pada tahun 2013, seseorang bernama Abubakar Al-Baghdadi mendeklarasikan terbentuknya ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). ISIS adalah sebuah kelompok yang bertujuan mendirikan sebuah "*khilafah*", sebuah negara yang dikuasai satu pemimpin keagamaan dan politik menurut hukum Islam atau *syariah*.

Awalnya, Amerika Serikat hanya sekedar mengawasi kelompok tersebut dan tidak memberikan perhatian lebih. Namun lambat laun, ISIS tumbuh dan berkembang menjelma menjadi sebuah kelompok yang mampu menebarkan ancaman dan teror. Hal ini pula yang membuat Amerika Serikat mulai menaruh perhatian terhadap ISIS. Seiring berjalannya waktu, ISIS kian berkembang dan bertambah besar, jumlah pengikutnya pun semakin banyak. Hal ini tidak lepas dari strategi ISIS dalam menyebarkan propagandanya di mana ISIS bercita-cita untuk membangkitkan kejayaan umat Islam dengan cara mendirikan sebuah "Negara Islam".

Kapabilitas Ekonomi dan Militer

Amerika Serikat adalah negara adidaya yang memiliki kekuatan yang sangat diperhitungkan di dunia internasional. Tak jarang pula karena kekuatan yang dimilikinya Amerika Serikat yang berstatus sebagai salah satu anggota Dewan Keamanan (DK) tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mengklaim dirinya sebagai polisi internasional ini, ikut campur dalam urusan negara-negara yang sebenarnya bukan termasuk wilayah teritorialnya. Berbagai alasan seperti perang melawan terorisme, sering dipakai guna melancarkan segala kepentingannya.

Intervensi yang dilakukan Amerika Serikat di berbagai wilayah Timur Tengah, khususnya di Irak dan Suriah, memunculkan opini masyarakat internasional yang menganggap bahwa, segala kebijakan Amerika Serikat di Irak dan Suriah sarat akan berbagai kepentingan. Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, menyatakan bahwa Amerika Serikat akan terus ikut campur dan punya peran di Timur Tengah. Obama juga menyatakan bahwa selama puluhan tahun, Amerika Serikat memiliki kepentingan di kawasan tersebut, seperti kontra terorisme, menghentikan penyebaran senjata nuklir, mengamankan perdagangan bebas, menjaga dan membela keamanan Israel, serta berusaha mendamaikan konflik Arab-Israel.

Dengan ikut campurnya Amerika Serikat dalam menangani ISIS di Irak (dan Suriah), membuktikan bahwa Amerika Serikat mempunyai kepentingan di Irak. Alasan intervensi yang dilakukan Amerika Serikat mencakup dua faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor militer. Faktor ekonomi berupa *Middle Range Objectives* yaitu kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian melalui eksplorasi sumber alam terutama minyak dan gas. Sedangkan, faktor militer berupa *Long Range Goals* yaitu suatu pendekatan yang mengarah pada rencana jangka panjang dan sebagai penentu strategi yang kemudian diikuti dengan tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. (Adeodatus Lumba; 2015) Dalam usahanya memerangi ISIS di Irak, terdapat beberapa alasan maupun tujuan apabila ditinjau dari pendekatan militer tersebut, antara lain terkait dengan keamanan ladang-ladang minyak yang dikuasai Amerika Serikat maupun keamanan jalur suplainya, kepentingan ideologi/ demokratisasi di Irak, serta menjaga hegemoni Amerika Serikat di Irak.

Ekonomi; Mengamankan pasokan minyak bumi sebagai kepentingan nasional Amerika Serikat

Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya energi yang sangat penting bagi setiap negara, salah satunya Amerika Serikat. Dalam sejarah, minyak bumi mampu memengaruhi dinamika hubungan internasional, baik itu dalam bentuk kerjasama maupun dalam bentuk konflik atau perang. Di Irak sendiri, dikuasainya kilang minyak oleh ISIS menjadi kekhawatiran sendiri bagi Amerika Serikat karena konsentrasi ISIS di Irak adalah minyak.

Minyak bumi bukanlah satu-satunya sumber daya energi yang dimiliki oleh Amerika Serikat, masih ada sumber energi lainnya yang berpotensi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri mereka, seperti gas alam, batu bara, dan nuklir. Meskipun demikian, Amerika Serikat masih memosisikan minyak bumi sebagai prioritas sumber energi utamanya.

Sebab, keunggulan yang lebih mudah diakses dan dimobilisasikan dibanding gas alam, sifatnya yang lebih ramah lingkungan dan minim polusi bila dibandingkan dengan batu bara, serta penggunaannya lebih aman dan mudah diakses dibandingkan nuklir. Oleh karena itu, minyak bumi merupakan sumber daya energi utama bagi Amerika Serikat.

Sejak berakhirnya perang dunia ke-II, minyak bumi mampu menarik perhatian masyarakat Amerika Serikat karena penggunaan minyak bumi yang cenderung lebih mudah dan efektif. Sepanjang sejarah, sebenarnya Amerika Serikat memiliki sumber daya energi yang berlimpah, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, peningkatan tingkat konsumsi terhadap energi pun tidak dapat dielakkan. Pada tahap selanjutnya, tingkat konsumsi Amerika Serikat terus meningkat secara tajam, sehingga melebihi tingkat produksi dalam negeri. Oleh karena itu, Amerika Serikat dituntut untuk mengeksplorasi sumber daya energi dari wilayah lain dan mengimpornya. (Anne Normadiah; 2015)

Salah satu faktor meningkatnya tingkat konsumsi energi Amerika Serikat adalah pertumbuhan penduduk yang terus berkembang, sehingga menuntut perkembangan ekonomi yang sejalan. Konsumsi energi yang tinggi tersebut berasal dari kebutuhan energi pada tiga sektor utama yaitu perumahan, industri, dan transportasi. Sektor industri merupakan sektor terbesar yang mengonsumsi energi untuk kepentingan perkembangan industrialisasi dan ekonomi Amerika Serikat.

Sebagai negara industri maju, Amerika Serikat memiliki kepentingan tersendiri terhadap Irak yang merupakan negara berkembang. Secara umum, inilah yang menjadi perhatian Amerika Serikat agar tidak sampai berdampak negatif bagi kepentingan-kepentingan nasionalnya. Konsentrasi Amerika Serikat terhadap Irak yang tidak stabil dan rawan konflik, mulai meningkat ketika instabilitas Irak sebagai produsen minyak mampu memengaruhi akses impor minyak dalam negeri Amerika Serikat, sehingga kecenderungannya meningkat menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Bagi Amerika Serikat, yang merupakan salah satu negara konsumen minyak bumi, alasan yang selalu dihadapi terkait ketersediaan cadangan minyak dunia adalah keterbatasan cadangan minyak dunia. Menyermati krisis minyak yang pernah terjadi, serta instabilitas kawasan yang mengandung cadangan minyak bumi, maka Amerika Serikat meningkatkan perhatian seriusnya terhadap akses suplai minyak bumi.

Tingginya intensitas ketergantungan Amerika Serikat terhadap minyak bumi, mendorong Amerika Serikat turut berpartisipasi baik secara politik maupun militer di Irak. Keterlibatan Amerika Serikat secara militer di Irak menunjukkan adanya keinginan untuk mengontrol dan menguasai sumber minyak yang merupakan bagian dari masalah energi Amerika Serikat.

Kebutuhan Amerika Serikat terhadap minyak yang begitu besar dengan cara mengimpor sekitar 53%, telah mendorong Washington untuk mencari sumber-sumber cadangan minyak untuk mengamankan kepentingan minyaknya. Cadangan minyak Amerika Serikat hanya berjumlah 22 milyar barel. (Mohammad Safari dan Al-Muzammil Yusuf, ed.; 2013) Apabila kebutuhan minyak Amerika Serikat dibandingkan dengan cadangan minyak mentahnya, maka Amerika Serikat “hanya” akan mampu memenuhi kebutuhan minyak dalam negerinya selama tiga tahun. Sedangkan saat ini, Amerika Serikat menempati urutan pertama sebagai negara paling banyak mengonsumsi minyak dunia.

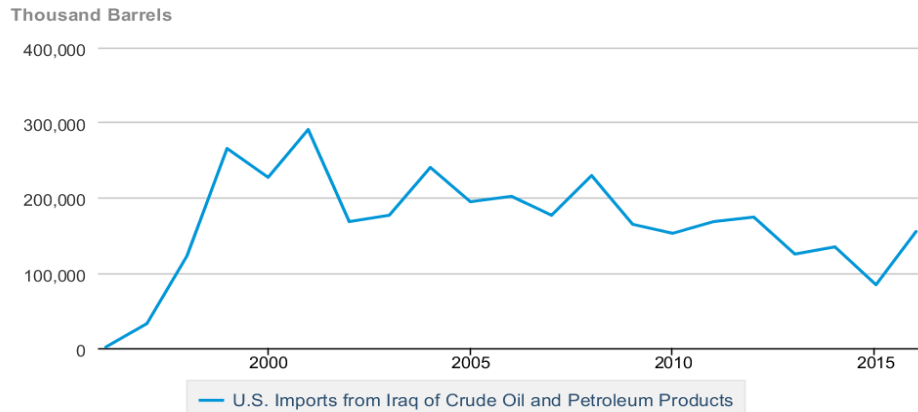
Alasan Amerika Serikat sebagai negara pengimpor minyak bumi terbesar, di antaranya adalah karena wilayah negara Amerika Serikat yang sangat luas, sehingga memerlukan penggunaan bahan bakar untuk keperluan kendaraan bermotor, keperluan industri-industri dalam negeri, dan bahan bakar untuk pemanas rumah yang biasanya digunakan warga Amerika Serikat. Di samping itu, jumlah penduduk Amerika Serikat yang terus bertambah membuat tingkat konsumsi terhadap energi semakin meningkat.

Irak adalah sebuah negara yang memiliki cadangan minyak ke dua terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Faktor minyak selalu menjadi isu sentral dan senantiasa dilihat sebagai salah satu pemicu konflik di Irak, tak terkecuali pula dalam konflik Amerika Serikat-Irak. (Reza Sihbudi; 2007)

Sebagai salah satu negara industri besar, sangat wajar jika Amerika Serikat memerlukan minyak dalam jumlah yang begitu besar untuk menjalankan kegiatannya. Oleh karena itu, Amerika Serikat harus memenuhi kebutuhannya akan minyak dengan jalan melakukan impor. Amerika Serikat mengimpor 53% dari kebutuhan minyaknya dan impornya diperkirakan akan meningkat hingga 62% pada tahun 2020. (Abdul Rahman Mustafa; 2003) Ketergantungan terhadap minyak dari Irak akan semakin meningkat di masa yang akan datang, mengingat selain Irak memiliki cadangan minyak yang besar, kebutuhan Amerika Serikat akan sumber daya energi terutama minyak terus mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu.

Grafik Impor Produk Minyak Mentah dan Minyak Bumi Amerika Serikat dari Irak

U.S. Imports from Iraq of Crude Oil and Petroleum Products



 Source: U.S. Energy Information Administration

Akan tetapi, keberadaan ISIS di Irak memang berdampak pada suplai produk minyak dari Irak ke Amerika Serikat. Pada tahun 2013, ISIS mulai berani menunjukkan eksistensinya dan bahkan, mendeklarasikan terbentuknya Negara Islam di Irak dan Suriah, serta mereka juga mengancam kepada pihak manapun yang berani menghalang-halangi cita-cita mereka. Pada data-data di atas, bisa kita lihat bahwa memasuki tahun 2013, suplai yang diterima oleh Amerika Serikat mengalami penurunan, bahkan setelah itu, angka tertinggi yang berhasil dicatat terjadi pada tahun 2016 sebanyak 155.122 barel. Padahal, angka terendah yang dicatat untuk suplai minyak dari Irak pada kepemimpinan Presiden Obama periode pertama adalah 151.619 yang terjadi pada tahun 2010.

Selain cadangan minyak yang dimiliki Irak, terdapat hitung-hitungan ekonomi bisnis lainnya yang mendasari kebijakan Amerika Serikat memerangi kelompok ISIS di Irak, antara lain bahwa minyak dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia jika harganya tidak stabil, terutama saat harga minyak naik secara tajam. (Reza Sihbudi; 2003) Hal ini menyebabkan nilai impor minyak meningkat dan biaya produksi meningkat yang akhirnya akan menurunkan produktivitas. Produktivitas ekonomi yang turun akan membuat merosot perekonomian dan menghambat pertumbuhan kesempatan kerja, di sisi lain pertumbuhan ekonomi tentu penting bagi Amerika Serikat. Maka dari itu akan sangat merugikan bagi Amerika Serikat, apabila kilang-kilang minyak di Irak berhasil dikuasai oleh ISIS.

Industri minyak lahir di Amerika Serikat dan secara otomatis membawa mata uang Dollar Amerika sebagai patokan harga minyak, begitu juga untuk pembayarannya. (Dirgo D. Purbo; 2006) Semenjak digunakan dalam transaksi perdagangan minyak internasional, Dollar telah menjadikan Amerika Serikat sebagai hegemoni ekonomi dunia. Oleh karena itu, dengan memberantas keberadaan ISIS di Irak dan mengamankan ladang-ladang minyak Irak dari tangan mereka, secara tidak langsung Amerika Serikat telah membuat suatu langkah besar dalam rangka menguasai cadangan minyak Irak. Dari situ, Amerika Serikat dapat semakin mengukuhkan hegemoni mereka dalam perekonomian dunia karena dengan menguasai cadangan minyak bumi Irak, itu sama halnya dengan menguasai cadangan minyak bumi terbesar kedua di dunia (setelah Arab Saudi). Amerika Serikat bisa memanfaatkan kondisi tersebut untuk semakin menguatkan mata uang Dollar melalui transaksi jual-beli minyak bumi dan apabila posisi mata uang Dollar Amerika semakin menguat, maka hal tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi negara menjadi lebih tinggi.

Militer; Alat untuk mewujudkan kepentingan nasional Amerika Serikat

Alat untuk mengamankan cadangan minyak bumi

Minyak menguasai sektor-sektor industri yang menjadi jantung perekonomian di negara-negara Barat. Kekuatan militer Amerika Serikat terletak pada penguasaan akses sumber-sumber minyak, bahkan tidak dapat bertahan tanpa terjaminnya pasokan karena minyak merupakan kepentingan vital negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat, oleh karena itu tidak ada satu negara pun diizinkan untuk mendominasi pasokan minyak dunia. (Siti Muti'ah Setiawati, et al.; 2004) Jika perlu, kekuatan senjata menjadi penjamin terakhir keamanan pasokan.

Negara-negara industri maju menjadi lebih tergantung pada impor minyak dan terkadang mengalami kekurangan pasokan. Maka dari itu, minyak tidak hanya menjadi isu kebijakan luar negeri, tetapi juga keamanan nasional. Kekuatan minyak juga dibuktikan dengan fakta bahwa kekuatan militer Amerika Serikat lebih banyak dipakai sebagai alat untuk jasa mengamankan minyak. Ladang-ladang minyak di luar negeri dan rute-rute pasokan dilindungi oleh militer agar pasokan terjamin.

Mengamankan kepentingan minyak di Irak telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat telah memiliki komitmen kuat untuk menjaga dan melindungi minyak di kawasan Timur Tengah, khususnya di Irak. Di era kepemimpinan presiden sebelumnya, yakni Presiden George W. Bush, Amerika Serikat telah melakukan langkah-langkah untuk mengamankan cadangan minyak di Irak agar bisa berada di dalam

kekuasaan Amerika Serikat. Langkah-langkah yang diambil kala itu bisa dibilang sebagai langkah yang bersifat agresif/ represif yaitu dengan cara menginvasi Irak. Demi mendapatkan akses ke ladang-ladang minyak, Amerika Serikat melancarkan invasi ke Irak untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein dengan dalih memberantas senjata pemusnah massal yang dipunya Irak kala itu. Rezim Saddam Hussein digulingkan karena rezim tersebut dianggap tidak pro dan bahkan, berani melawan Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah Irak juga mengeluarkan sebuah ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat ketika pemerintah pimpinan Saddam Hussein ini berniat menjual minyaknya dalam Euro, beberapa waktu sebelum Amerika Serikat melansir kampanye perangnya.

Keberhasilan Amerika Serikat dalam menggulingkan Saddam Hussein dari tampuk kepemimpinan Irak bukan berarti bahwa, Amerika Serikat bisa menguasai Irak dengan mudah di kemudian hari. Apabila di era Presiden Bush ada Saddam Hussein, maka di era Presiden Obama ada kelompok teroris ISIS sebagai pihak yang berpotensi mengancam kepentingan nasional Amerika Serikat terutama di Irak itu sendiri. Dengan adanya kemunculan ISIS di Irak, hal tersebut menjadi sebuah ancaman bagi keamanan cadangan minyak yang ada di sana. Ladang-ladang minyak menjadi salah satu target ISIS untuk dikuasai karena dapat menghasilkan pundi-pundi uang bagi mereka. Presiden Obama pun tidak tinggal diam dengan kemunculan kelompok teroris ISIS ini. Presiden Obama membuat kebijakan untuk perang melawan ISIS, mulai dari pengerahan kekuatan militer dalam negeri, hingga membentuk opini publik dan mengajak negara-negara lain untuk memerangi ISIS dengan cara membentuk pasukan koalisi anti-ISIS.

Dipilihnya kebijakan untuk melancarkan perang dengan ISIS, selain karena perang global terhadap terorisme, adalah untuk mengamankan sumber-sumber minyak dari tangan kelompok teroris tersebut. Perang melawan ISIS yang dilancarkan pemerintahan Presiden Obama dapat dilihat sebagai kebijakan luar negeri yang rasional, yang bertumpu pada kepentingan minyak dan pelestarian dominasi Amerika Serikat di Timur Tengah pada umumnya dan di Irak secara khusus. Kebijakan Presiden Obama tersebut membuktikan bahwa minyak yang menjadi salah satu isu sentral dari perang tersebut berkaitan erat dengan kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional. Seringkali yang dimaksudkan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat adalah kepentingan perusahaan-perusahaan ini untuk memperoleh akses ke ladang-ladang minyak di Irak.

Kepentingan ideologi

Kepentingan ideologi Amerika Serikat di Irak melalui kebijakan Presiden Obama memerangi kelompok teroris ISIS adalah untuk menjaga ideologi demokrasi yang telah diupayakan oleh pemerintah Amerika Serikat sejak tergulingnya rezim Saddam Hussein hasil invasi militer tahun 2003. Selain itu, kebijakan Presiden Obama ini sekaligus sebagai upaya pemberangusan terhadap gerakan Islam fundamentalis. Menurut Amerika Serikat, gerakan-gerakan Islam fundamentalis merupakan bahaya yang bisa mengancam eksistensi Amerika Serikat dan kepentingannya di Irak maupun kawasan Timur Tengah. Dalam hal ini, ISIS dianggap sebagai sebuah ancaman yang nyata bagi pemerintah Amerika Serikat karena salah satu tujuan mengapa ISIS lahir adalah untuk mewujudkan Negara Islam yang berteritorial Irak dan Suriah dengan menganut ke-*khilafah*-an sebagai sistem pemerintahan di mana rencananya Abu Bakar Al-Baghdadi (pemimpin ISIS) nantinya akan diangkat sebagai sang *khalifah* (pemimpin negara). Sementara, demokrasi dianggap sebagai sistem yang paling tepat untuk diterapkan di Irak menggantikan sistem otoriter yang terbukti telah membuat Irak terjerumus dalam banyak medan pertempuran selama dipimpin oleh Saddam Hussein seperti Perang Iran-Irak, Perang Kuwait, dll.

Kebijakan Presiden Obama untuk memerangi ISIS dinilai tepat, maka dari itu legislatif Amerika Serikat pun ikut mendukung kebijakan tersebut. Cita-cita ISIS untuk mendirikan Negara Islam di Irak (dan Suriah) sama saja ISIS telah mempersiapkan langkah kudeta dan penggantian sistem pemerintahan suatu negara secara paksa. Sama halnya juga ISIS telah mencederai legitimasi pemimpin negara yang sedang berkuasa saat itu. Selain itu, Amerika Serikat jelas tidak ingin apa yang telah mereka upayakan selama ini, terutama hasil dari invasi militer pada tahun 2003 yang membuat demokrasi akhirnya bisa ditanamkan di Irak, harus sirna di tangan ISIS yang ingin mendirikan Negara Islam. Sebab menyebarkan ideologi demokrasi merupakan tujuan nasional Amerika Serikat dan untuk mewujudkannya jelas memerlukan biaya dan pengorbanan yang sangat besar.

Konteks Internasional; Ancaman Islamic State of Iraq and Syria terhadap Sekutu-Sekutu Amerika Serikat dan Pembentukan Pasukan Koalisi Anti-ISIS

Seperti diketahui dunia internasional, *Islamic State of Iraq and Syria* atau yang lebih dikenal sebagai ISIS telah melakukan berbagai serangan, ancaman, bahkan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi untuk mempertahankan eksistensinya dan membangun sebuah negara baru. Terhitung sejak tahun 2003 hingga saat ini, serangan-serangan yang dilakukan di kawasan Timur Tengah

dengan dalih memerangi Amerika Serikat menjadi bukti kekejaman kelompok yang juga disebut sebagai 'Al-Qaeda Irak' ini.

Menurut laporan organisasi Masyarakat Medis Suriah-Amerika, kelompok ISIS telah melakukan lebih dari 160 serangan yang melibatkan gas-gas beracun seperti sarin, klorin, dan gas mustard, sejak pecahnya konflik Suriah pada tahun 2011. Setidaknya 1.491 orang dilaporkan tewas dalam serangan-serangan kimia itu.

Pada Agustus 2013, ratusan orang tewas akibat serangan kimia di Ghouta, pinggiran Damaskus. Menurut media setempat, roket yang digunakan dalam serangan itu mengandung gas sarin. Kemudian, dalam serangan lainnya, media milik pemerintah Suriah mengatakan setidaknya 14 orang tewas dan lebih 30 lainnya luka-luka dalam dua ledakan yang mengguncang ibukota Damaskus. Televisi pemerintah mengatakan, bom diletakkan di dalam beberapa tas yang kemudian diletakkan di luar toko di kawasan perdagangan Lapangan Marjeh. Organisasi Pemantauan Suriah untuk HAM yang berkantor di Inggris, seperti dikutip kantor berita Reuters, mengatakan salah satu bom meledak di dalam kantor polisi. Organisasi ini juga mengatakan bahwa sebagian besar korban adalah anggota polisi. Tak hanya serangan-serangan bom bunuh diri dan senjata kimia, ISIS juga melakukan aksi kekejaman terhadap beberapa orang dan kelompok yang dianggap menyimpang dari kelompok mereka.

Pada tahun 2014 lalu, ISIS merilis video pemenggalan kepala secara langsung terhadap wartawan Amerika Serikat, James Wright Foley, sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat 12 hari sebelumnya. Foley yang dikabarkan hilang sejak tahun 2012 menjadi sasaran kekejaman ISIS yang disaksikan oleh seluruh dunia. Dalam video berjudul 'Pesan untuk Amerika', seorang pria seperti James Foley mengenakan pakaian yang bagian lututnya berwarna oranye. Dia berada di samping seorang pria berpakaian hitam yang memegang senjata. Militan yang berbicara dengan bahasa Inggris dan mengidentifikasi dirinya sebagai anggota ISIS mengatakan, kematian jurnalis ini adalah akibat langsung pengeboman Amerika Serikat terhadap ISIS di Irak.

Atas serangan dan kekejaman yang dilakukan oleh ISIS, masyarakat internasional pun tidak tinggal diam. Berbagai kecaman dan tindakan dilakukan oleh beberapa negara dan organisasi internasional. Dewan Keamanan PBB, pada bulan Agustus 2014 lalu, mengecam serangan terakhir ISIS di wilayah Sinjar yang disebut-sebut berpotensi menimbulkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dewan Keamanan juga mengancam bahwa siapapun yang bertanggung jawab atas pertumpahan darah khususnya terhadap warga sipil, akan menghadapi pengadilan untuk kejahatan kemanusiaan. Pernyataan ini menjadi kecaman kedua DK PBB dalam dua pekan terakhir untuk ISIS, menyusul serangan kilat yang digelar pada awal Juni lalu yang mencaplok sebagian besar wilayah utara Irak. DK PBB menyebut ISIS sebagai ancaman tak hanya bagi Irak dan Suriah, tetapi juga untuk keamanan, perdamaian, dan stabilitas kawasan.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Vatikan, yang menyerukan kepada para pemimpin Muslim di seluruh dunia untuk mengecam kebrutalan ISIS yang kini menguasai wilayah utara Irak. Vatikan mengatakan, tidak ada pembenaran apapun yang bisa diberikan untuk kejahatan yang dilakukan ISIS terhadap kelompok minoritas di wilayah tersebut. Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama mengatakan, ISIS bersalah melakukan berbagai kejahatan seperti pembunuhan, mutilasi, penyaliban, dan menyeret mayat di tempat publik, menculik perempuan, serta kejahatan lainnya. Dewan tersebut menambahkan bahwa tak ada alasan apapun, apalagi alasan agama, yang bisa membenarkan tindakan barbar seperti ini. Mereka juga menyerukan kepada semua pihak untuk bersatu dan mengecam kejahatan ini serta menolak penggunaan agama untuk membenarkan kejahatan ini.

Sementara itu, negara-negara lain juga mengambil tindakan tegas. Amerika Serikat, yang merupakan musuh utama ISIS mulai mengajak dan melakukan pendekatan terhadap negara-negara besar lainnya untuk bersama-sama memerangi ISIS. Sejak 10 September 2014, Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, mulai berkampanye soal strategi “pelemahan hingga akhirnya pemusnahan” ISIS. Sejauh ini, baru Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) yang secara resmi menyatakan terlibat dalam operasi militer anti-ISIS di Suriah, sedangkan negara-negara Barat sekutu Amerika Serikat baru sebatas ikut berperan di Irak dan belum siap terlibat dalam serangan di Suriah. Amerika Serikat mengklaim bahwa telah membentuk koalisi untuk memerangi ISIS di Irak dan Suriah. Dalam sebuah pertemuan informal yang dihadiri enam menteri pertahanan dari Inggris, Perancis, Australia, dan tiga negara lain, Menlu Amerika Serikat, John Kerry, menyatakan dunia internasional membutuhkan strategi dan gagasan yang solid ihwal sumbangan masing-masing negara untuk memerangi ISIS. Menurutnya jika sebagian negara anggota koalisi keberatan terlibat dalam pertempuran, mereka bisa membantu menyediakan informasi, perlengkapan, amunisi, atau persenjataan. "Kita punya teknologinya, kita punya know-how," kata Kerry. Sementara itu Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Chuck Hagel, mengatakan koalisi 10 negara itu mencerminkan aliansi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di Irak dan Suriah. Ia juga mengklaim anggota koalisi bisa bertambah setiap saat. Pertemuan informal antara negara anggota koalisi itu digelar di sela-sela pertemuan puncak NATO di Wales. Amerika Serikat sejak awal berniat mengajak lebih banyak negara untuk meredam geliat ISIS yang saat ini menguasai sebagian besar wilayah utara dan barat Irak, serta Suriah.

Koalisi Anti-ISIS tidak hanya dibentuk oleh negara-negara barat dan sekutunya. Negara-negara Timur Tengah yang dipimpin oleh Arab Saudi juga tidak ingin ketinggalan menunjukkan komitmen untuk memerangi ISIS dengan membentuk Koalisi Negara Islam Anti-ISIS pada bulan Desember 2015. Arab Saudi secara resmi mengumumkan pembentukan koalisi militer anti-terorisme yang terdiri dari 34 negara. Arab Saudi mengatakan bahwa negara-negara tersebut telah memutuskan untuk membentuk aliansi militer untuk melindungi segenap negara muslim dan penduduknya dari kejahatan kelompok teroris termasuk ISIS.

Kedua koalisi tersebut pun merancang strategi dan upaya-upaya untuk memerangi ISIS. Koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat terus mematangkan rencana untuk menyerang ISIS di Suriah. Negara-negara dari Eropa dan Australasia (Australia-Selandia Baru) telah membuka jalan untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam hal ini. Diplomat Senior Eropa mengatakan bahwa, situasi saat ini tidak dapat diterima dan membutuhkan usaha yang berlipat ganda.

Pemerintah di negara-negara barat saat ini berada di bawah tekanan untuk mengatasi krisis 380.000 migran dan pengungsi, termasuk di antaranya balita yang tenggelam dalam pelayaran di Mediterania, Aylan Kurdi. Sebanyak 4 juta warga Suriah melarikan diri dari tanah air mereka akibat perang saudara yang dimulai sejak 4 tahun lalu. Meskipun saat ini telah dibuka pangkalan udara baru Turki di Incirlik dan Diyarbakir perbatasan Suriah, dua per tiga dari 6.700 serangan udara yang dilakukan sejak Agustus 2014 terjadi di dalam negeri. Irak telah mengeluarkan USD 4 juta untuk kampanye serangan udara koalisi terhadap ISIS. PM Australia, Tony Abbott, pun telah mengumumkan bahwa negaranya akan ikut ambil bagian dalam koalisi dan siap menambah daya tampung pengungsi sebanyak 12 ribu orang. Bahkan Prancis telah melangkah lebih jauh, PM Prancis, Manuel Valls, menyebut Prancis telah melakukan aksi intelijen, pengawasan, dan pengintaian melalui pemerintah yang terkait.

Amerika Serikat dan sekutunya melancarkan 20 serangan udara terhadap kelompok militan ISIS di Irak dan enam lainnya di Suriah. Berdasarkan laporan rutin Gugus Tugas Gabungan Amerika Serikat, seperti dikutip *Reuters* pada Selasa, 2 Februari 2016, serangan di Irak meliputi area Qayyarah, Kisik, Ramadi, dan Mosul. Misil jet menghancurkan sebuah bahan peledak, pos pemeriksaan, empat posisi tempur, dan gudang senjata ISIS.

Serangan lainnya di Irak juga dilakukan di dekat Albu Hayat yang menghancurkan sebuah unit taktis dan satu posisi tempur ISIS. Dalam serangan di Habbaniyah, koalisi Amerika Serikat menghancurkan dua kendaraan berat dan satu gudang bahan peledak ISIS. Satu unit taktis lainnya hancur terkena misil koalisi di Sinjar.

Sementara di Suriah, serangan koalisi di dekat Raqqa menghancurkan tiga eskavator dan satu unit taktis. Dua pabrik gas dan minyak yang dikuasai ISIS dihantam koalisi di dekat Dayr Az Zawr dan serangan lainnya di Manjib mengenai sebuah pusat pelatihan dan tiga bangunan. Lebih dari 25 ribu militan ISIS tewas dalam serangan udara koalisi sejak operasi dimulai 18 bulan lalu. Amerika Serikat mengestimasi ISIS memiliki 20 hingga 30 ribu militan di Irak dan Suriah.

KESIMPULAN

Keberadaan ISIS di Irak benar-benar membuat pemerintah Amerika Serikat menjadi cemas dan khawatir. Pemerintah Amerika Serikat menganggap bahwa, ISIS merupakan sebuah ancaman yang nyata bagi kepentingan nasional Amerika Serikat, baik di Irak maupun kawasan Timur Tengah. Hal inilah yang membuat politik luar negeri Amerika Serikat terhadap ISIS mempunyai porsi dan perhatian yang cukup besar. Tetapi, bukan hanya semata-mata karena kepentingan minyak bumi belaka, terdapat 3 faktor yang memengaruhi Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap ISIS di masa kepemimpinan Presiden Obama yaitu Kondisi Politik Dalam Negeri, Kapabilitas Ekonomi dan Militer, serta Konteks Internasional.

1. Politik Dalam Negeri; Terorisme menjadi salah satu isu yang sensitif bagi rakyat Amerika Serikat, apalagi semenjak adanya kejadian serangan 11 September. Tragedi tersebut benar-benar membuat rakyat Amerika Serikat mengalami ketakutan dan trauma yang luar biasa. Pasca kejadian tersebut, isu terorisme menjadi salah satu agenda penting dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat berupa *Global War On Terrorism* (GWOT). Meskipun Partai Republik dan Partai Demokrat memiliki pandangan maupun ideologi yang berbeda, namun untuk masalah keamanan nasional terutama ancaman terorisme, kedua partai ini mempunyai kebijakan yang sama yaitu memerangi segala bentuk tindak kejahatan terorisme. Ketika Partai Republik berkuasa, pemerintah Amerika Serikat membuat kebijakan *Pre-Emptive Strike* di mana kebijakan inilah yang menjadi cikal bakal invasi militer Amerika Serikat terhadap Irak. Kemudian, saat Partai Demokrat berkuasa, kampanye *Global War On Terrorism* tetap berlanjut. Di periode pertama, Presiden Obama menambah jumlah pasukan militer Amerika Serikat di Afghanistan untuk menumpas kelompok teroris Al-Qaeda. Lalu di periode keduanya, Presiden Obama membuat kebijakan memerangi gerakan ISIS di Irak (dan Suriah). Jadi, partai manapun yang menjadi penguasa pemerintahan saat itu, segala bentuk tindak kejahatan terorisme akan selalu diperangi karena terorisme adalah musuh bersama bagi rakyat Amerika Serikat.
2. Kapabilitas Ekonomi dan Militer; Tingginya tingkat konsumsi minyak membuat Amerika Serikat harus melakukan eksplorasi untuk bisa memenuhi kebutuhan suplai minyaknya dan kawasan Timur Tengah pun dilirik karena kawasan tersebut mempunyai cadangan minyak bumi yang besar. Kebijakan Presiden Amerika Serikat Barack Obama terhadap Irak di bidang ekonomi salah satunya masih berfokus pada kepentingan minyak bumi. Namun, keberadaan ISIS di Irak menjadi sebuah ancaman besar bagi kepentingan minyak bumi Amerika Serikat di Irak. Semenjak kemunculan gerakan ISIS, suplai/ impor produk minyak yang diterima Amerika Serikat dari Irak mengalami penurunan. Kemudian, di bidang militer, Presiden Barack Obama membuat kebijakan untuk memerangi dan memberantas keberadaan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Kebijakan tersebut diambil karena ISIS dianggap sebagai kelompok teroris yang dapat mengancam kepentingan nasional Amerika baik di Irak, maupun di kawasan Timur Tengah. Maka

dari itu, agar kepentingan nasionalnya dapat tetap terjaga, pemerintah Amerika Serikat menggunakan militer mereka sebagai alat untuk menjaga cadangan minyak bumi, baik sebagai penjamin keamanan pasokan maupun untuk mencegah jatuhnya ladang-ladang minyak ke tangan ISIS. Selain itu, militer juga berfungsi untuk menjaga ideologi demokrasi tetap terjaga di Irak karena demokrasi merupakan salah satu warisan berharga dari invasi militer tatkala menggulingkan rezim Saddam Hussein pada tahun 2003. Amerika Serikat jelas tidak ingin hasil invasi militer yang telah memerlukan banyak pengorbanan mulai dari tenaga, biaya, hingga nyawa manusia sirna dan tergantikan oleh cita-cita ISIS untuk mendirikan sebuah Negara Islam.

3. Konteks Internasional; Pada mulanya, keberadaan ISIS tidak begitu dianggap sebagai sebuah ancaman yang berarti. ISIS masih dianggap sebagai gerakan Islam berpaham radikal kelas teri dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Al Qaeda yang sudah dicap sebagai kelompok teroris oleh dunia internasional saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, eksistensi dan sepak terjang ISIS makin gencar dan agresif, sehingga membuat mereka menjadi sebuah ancaman bagi keamanan internasional. Serangan-serangan/ teror-teror yang dilancarkan ISIS tidak hanya diarahkan kepada Amerika Serikat saja, melainkan telah menyasar kepada sekutu-sekutu Amerika Serikat. Selain itu, serangan-serangan yang dilancarkan oleh ISIS juga mengenai warga sipil yang tak berdosa dan apa yang telah ISIS perbuat termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chossudovsky, Michel. 2005. *War on Terrorism*. Global Research.
- CIA. 2009. *The World Factbook*. United States: CIA.
- Coplin, William D. dan Marsedes Marbun (Penterjemah). 2003. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algesindo edisi ke-2.
- Jatmika, Sidik. 2014. *Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah*. Yogyakarta: Maharsa Publishing House.
- Lumba, Adeodatus. 2014. *Intervensi Militer Amerika Serikat dalam Konflik Politik di Suriah Tahun 2011*. Hal. 8, dalam Nining Anggriani. *Sikap Amerika Serikat terhadap Gerakan ISIS di Irak dan Suriah* (Skripsi). Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Mashuri, Kiram Ikhwanul. 2014. *ISIS: Jihad atau Petualangan*. Jakarta: Republika.
- Mustafa, Abdul Rahman. 2003. *Geliat Irak Menuju Era Pasca Saddam Hussein*. PT. Kompas Media Nusantara.
- Normadiah, Anne. 2011. *Pengaruh Kepentingan Minyak pada Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Invasi Irak Tahun 2003*. Hal 46, dalam Nining Anggriani. *Sikap Amerika Serikat terhadap Gerakan ISIS di Irak dan Suriah* (Skripsi). Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Purbo, Dirgo D.. 2006. *Geopolitik Perminyakan*. Verbun Centre for the Study of Intelligence and Counter Intelligence.
- Safari, Mohammad dan Al-Muzammil Yusuf, ed. 2013. *Perang Irak-AS: Hegemoni Baru AS di Timur Tengah dan Dampak Globalnya*. Jakarta: COMES.
- Setiawati, Siti Muti'ah, et al. 2004. *Irak di Bawah Kekuasaan Amerika, Dampaknya bagi Stabilitas Politik Timur Tengah dan Reaksi (Rakyat) Indonesia*. Yogyakarta: PPMTT HI FISIPOL, Universitas Gadjah Mada.
- Sihbudi, Reza. 2007. *Menyandera Timur Tengah*. PT. Mizan Republika.
- Tambunan, Fernando. 2014. *Sejarah dan Ideologi ISIS*. Jakarta.
- Tim Redaksi Hot Copy. 2002. *Di Balik Perseteruan AS vs Taliban: Perang Afghanistan*. Jakarta: Gramedia.

Jurnal:

Sihbudi, Reza. 2003. *Pasca Agresi Amerika Serikat ke Irak*. Jurnal Demokrasi dan HAM. Vol. 3, No. 2: 39.

Internet:

Bruce, Mary. ABCNews : 11 Januari 2009. *Obama : Gitmo Likely won't Close in First 100 Days*,
<http://abcnews.go.com/ThisWeek/Economy/story?id=6619291&page=1>.
Diakses pada 15 Agustus, 20.03 WIB.

Haryono, Willy. 2016. *Serangan Koalisi AS terhadap ISIS di Irak Kian Mematikan*.
<http://internasional.metrotvnews.com/read/2016/01/21/214312/serangan-koalisi-as-terhadap-isis-di-irak-kian-mematikan>. Diakses pada 18 Juli 2017, 13.34 WIB.

<http://global.liputan6.com/read/2093507/isis-rilis-video-pemenggalan-wartawan-as>. Diakses pada 27 November 2017, 10.20 WIB.

<http://internasional.kompas.com/read/2014/08/05/09525751/Bagaimana.ISIS.Terbentuk>. Diakses pada 27 November 2017, 09.52 WIB.

<http://internasional.kompas.com/read/2014/08/06/17342301/DK.PBB.Kecaman.Serangan.ISIS.Terhadap.Suku.Minoritas.Irak>. Diakses pada 27 November 2017, 10.38 WIB.

<http://internasional.kompas.com/read/2014/08/12/19562531/Vatikan.Desak.Pemimpin.Muslim.Kecam.Kejahatan.ISIS>. Diakses pada 27 November 2017, 11.01 WIB.

<http://jateng.metrotvnews.com/read/2016/02/03/478807/koalisi-anti-isis-lancarkan-26-serangan-di-irak-dan-suriah>. Diakses pada 27 November 2017, 11.58 WIB.

<https://news.detik.com/bbc/2270431/dua-serangan-bom-bunuh-diri-guncang-damaskus>. Diakses pada 27 November 2017, 10.13 WIB.

<https://news.detik.com/internasional/d-3014837/as-dan-koalisi-matangkan-rencana-untuk-serang-isis>. Diakses pada 27 November 2017, 11.47 WIB.

<https://news.detik.com/internasional/3182961/isis-lancarkan-serangan-kimia-di-suriah-23-orang-tewas>. Diakses pada 27 November 2017, 09.57 WIB.

<http://www.cbsnews.com/stories/2002/09/04/september11/main520830.shtml>.
Diakses pada 13 Agustus 2017, 14.47 WIB.

<http://www.dw.com/id/as-bentuk-koalisi-10-negara-perangi-isis/a-17904067>.
Diakses pada 27 November 2017, 11.17 WIB.

<http://www.kabarmakkah.com/2015/12/ini-daftar-34-negara-yang-tergabung.html>.
Diakses pada 27 November 2017, 11.38 WIB.

Sari, Fitriana Monica. 2016. *5 Negara Konsumen Minyak Terbesar di Dunia*.
<http://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/5-negara-konsumen-minyak-terbesar-di-dunia/ar-BBxHPBt?li=AA59Az>. Diakses pada 16 Maret 2017,
16.12 WIB.

www.tempo.co/read/news/2014/09/09/116605610/Amerika-Serikat-Galang-Kekuatan-Melawan-ISIS. Diakses pada 15 Juli 2017, 11.43 WIB.

HALAMAN PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

**POLITIK LUAR NEGERI PRESIDEN AMERIKA SERIKAT BARACK
OBAMA TERHADAP GERAKAN *ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA*
(2009-2016)**

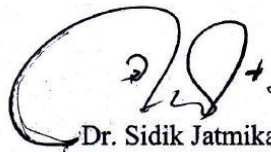
*Foreign Policy of The United States of America President Barack Obama
Against Islamic State of Iraq and Syria Movement (2009-2016)*

H Aidar Amin

20130510495

Naskah Publikasi/ Jurnal ini dinyatakan lulus dan disahkan oleh Dosen Pembimbing.

Dosen Pembimbing



Dr. Sidik Jatmika, M.Si